PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
Dody Sukma Arta Permana
NIM. E42011089

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat, 2015

E-mail **:** ***artha.dody@gmail.com***

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar di Kecamatan Seponti yang belum berhasil, yaitu semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kecamatan Seponti belum ada satupun yang mencapai standar pelayanan minimum pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan metode asosiatif/hubungan kausal. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai di Bidang Pendidikan Dasar, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, Sub Bagian Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, dan Seksi Pendidikan Kantor Camat Seponti. Hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi *product moment* bahwa sumber daya berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar sebesar 0,774. Hasil dari perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 59,9% sedangkan 40,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata-kata kunci: Sumber Daya, Keberhasilan Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar

THE INFLUENCE OF RESOURCES ON THE SUCCESS OF MINIMUM ELEMENTARY EDUCATION SERVICE STANDARD POLICY IMPLEMENTATION IN SEPONTI KAYONG UTARA REGENCY

Abstract

This thesis is written to identify and analyze the influence of resources on the sucess of minimum elementary education service standard policy implementation in Seponti Sub-district, Kayong Utara Regency. The thesis is written based on the problems faced by the ineffectiveness of current minimum service standard policy implementation. None of the elementary schools have met the minimum standard. The research is done by using quantitative paradigm and causal method. The research's hypothesis is there is a positive correlation between resources and the success of minimum elementary education service standard policy education in Seponti Sub-District, Kayong Utara Regency. The research's samples were taken from Bidang Pendidikan Dasar staffs, sub-sections of Rencana Kerja dan Keuangan and sub-sections of Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, and Seksi Pendidikan Kantor Camat Seponti. By using product moment correlation calculation, it is known that resources have impact of 0.774 on the success of minimum elementary education service standard policy. Determination coefficient calculation shows that resources have impact of 59.9% on the success of minimum elementary education service standard policy, while 40.1% are influenced by the other factors that is not discussed in this research.

Key words: Resources, The Success of Policy Implementation, Minimum Elementary Education Service Standard Policy

Dody Sukma Arta Permana, NIM. E42011089
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan instrumen yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta dalam konteks lebih luas merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif. Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, maka selayaknya pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan baik di pusat, provinsi maupun daerah. Ini diwujudkan dengan penganggaran semaksimal mungkin bagi kelangsungan proses pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal. Pemerintah telah mengambil kebijakan yaitu dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menyediakan dana sebesar 20% dari APBN/APBD yang diperuntukkan bagi bidang pendidikan diluar gaji pegawai termasuk gaji guru.

Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pelayanan pendidikan kepada masyarakat masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, akses terhadap sekolah, kualitas tenaga pendidik dan lain sebagainya. Masyarakat tentunya mengharapkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, agar capaian yang dihasilkan dari pelayanan pendidikan tersebut juga berkualitas dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.

Kabupaten Kayong Utara telah memprioritaskan pendidikan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 60.A tahun 2009 tentang penyediaan layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Sederajat di Kabupaten Kayong Utara. Program pendidikan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan di setiap lapisan masyarakat dan dapat menghasilkan mutu pendidikan yang baik berdasarkan kepada mutu guru dan tenaga pendidik.

Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan

Dody Sukma Arta Permana, NIM. E42011089
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat

pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM Pendidikan Dasar merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, terdapat 14 poin pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan fenomena yang terjadi bahwa tidak tercapainya implementasi SPM Pendidikan Dasar di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara. Hal ini diketahui berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014, dari 11 SD dan 5 SMP di Kecamatan Seponti belum ada satupun yang berhasil mencapai SPM Pendidikan Dasar. Dimana dari 11 SD dan 5 SMP yang ada di Kecamatan Seponti tidak ada satupun yang berhasil mencapai persentase SPM Pendidikan Dasar, yaitu harus mencapai 100%.

Tidak tercapainya SPM Pendidikan dasar di Kecamatan Seponti disebabkan karena Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara belum bisa memenuhi 14 poin pelayanan dasar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tersebut, yaitu pada poin kebutuhan guru yang bersertifikat dan pemenuhan fasilitas sekolah. Dimana menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara tahun 2014 diketahui bahwa dari 119 guru SD dan 64 guru SMP, hanya 18 guru SD dan 7 guru SMP yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Padahal sesuai Permendikbud No. 23 Tahun 2013 telah ditentukan bahwa di tingkat SD paling tidak terdapat 2 guru yang memiliki sertifikat pendidik di setiap sekolah, dan untuk tingkat SMP tersedia guru yang memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan jumlah tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik tersebut, tentunya masih banyak diperlukan kembali tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik agar SPM Pendidikan Dasar tersebut bisa tercapai.

Poin yang belum terpenuhi selanjutnya adalah terletak pada poin fasilitas yang ada di sekolah, yaitu masih kurang tersedianya Laboratorium IPA.

Dimana dijelaskan dalam kebijakan tersebut bahwa setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Namun pada kenyataanya masih ada SMP di Kecamatan Seponti yang belum memiliki laboratorium IPA, dimana berdasarkan data Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014, dari 5 SMP yang ada di Kecamatan Seponti hanya 1 SMP yang sudah memiliki Laboratorium IPA, sedangkan 4 lainnya belum memiliki Laboratorium IPA.

Dari fenomena yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh implementor terkait pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.
2. Jumlah pegawai yang tidak mencukupi dan memadai serta tidak kompeten dibidangnya.
3. Anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar yang terbatas.
4. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan.
5. Struktur birokrasi yang belum tersusun dan dilaksanakan dengan baik.

Dari beberapa hal di atas, menunjukkan bahwa terdapat banyak kendala yang berhubungan erat dengan keberhasilan implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:142-144) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan *(dispotition)* para pelaksana, komunikasi anatarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga dari apa yang telah diungkapkan tersebut dapat dilihat bahwa faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh bagi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada peneliti menduga bahwa faktor yang paling kuat mempengaruhi keberhasilan implementasi SPM Pendidikan Dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara adalah faktor Sumber Daya.

Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***"Pengaruh Sumber Daya terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar Di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara".***

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahn tersebut, maka rumusan permasalahan yang dapat diteliti adalah: "Adakah pengaruh Sumber Daya terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara?".

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sumber Daya terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan usaha untuk pengembangan bidang ilmu pemerintahan, khususnya dalam implementasi suatu kebijakan, serta meningkatkan kemampuan menganalisis masalah di sektor pemerintahan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan terutama di bidang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara. Sehingga aparatur pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai.

KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono 2013:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sedangakan menurut Harold

Laswell dan Abraham, Kaplan Carl I. Frederick, dan Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2008:55) kebijakan publik diartikan sebagai suatu program atau serangkaian tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah yang diusulkan dan dikerjakan untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi hambatan dalam rangka mencapai tujuan yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:106-110) terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

a. Akses

   Akses merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran.

b. Cakupan

   Cakupan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

c. Frekuensi

   Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan tersebut.

d. Bias

   Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor menyimpang kepada kelompok masyarakat yang bukan sasaran kebijakan.

e. Ketepatan Layanan

   Ketepatan layanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

f. Akuntabilitas

   Akuntabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah tindakan implementer dalam menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

g. Kesesuaian program dan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:142-144) mengungkapkan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, antara lain yaitu:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan
   Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
b. Sumber daya
   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
c. Karakteristik agen pelaksana
   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal implementasi suatu kebijakan harus diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
d. Sikap/kecenderungan (dispotition) para pelaksana
   Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
   Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.
f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
   Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang

keladi dari kegagalan kinerja implementasi.

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007: 152), sumber daya layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya merupakan suatu hal yang mencakup dana atau perangkat lain yang mendorong dan memperlancar implementasi secara efektif.

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2008:95) sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible).

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:142), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sumber daya, antara lain yaitu:

1) Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia ini yaitu terkait dengan kompetensi dan kapabilitas seseorang dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.Sedangkan menurut George Edward III (dalam Agustino 2006:151), selain sumber daya yang memiliki kompetensi dan kapabilitas, jumlah staf dan implementor yang memadai merupakan salah satu hal yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

2) Sumber Daya Finansial

   Sumber daya finansial merupakan sumber daya yang mencakup dana atau perangkat (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi agar berjalan secara efektif.

3) Sumber Daya Waktu

   Sumber daya waktu ini terkait dengan kuantitas waktu yang tersedia untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanasi asosiatif/penelitian kausal. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara.Pada penelitian ini populasi yang digunakan penulis berjumlah 23 orang pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan Seksi Pendidikan Kantor Camat Seponti. Terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Pendidikan Dasar, 1 orang Kasubbag Renja dan Keuangan, 1 orang Kasubbag Aparatur, 1 orang Kasi SD, 1 orang Kasi SMP, 6 orang Pengawas Sekolah, 11 orang Staf dan 1 orang Kasi Pendidikan di Kantor Camat Seponti.Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah Sampling Jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Maka populasi yang

menjadi anggota sampel berjumlah 23 orang.

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket dengan menggunakan skala likert, dan alat-alat yang mendukung dokumentasi. Uji validitas instrumen menggunakan rumus *Product Moment* dengan bantuan SPSS 18 *for Windows.* Uji Reliabilitas instrumen menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS 18 *for Windows.*

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Penyebaran angket/kuesioner:
   Yaitu dengan membagikan angket berisi beberapa item pernyataan kepada responden. Item-item pernyataan tersebut sudah dilengkapi alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling tepat.
b. Dokumentasi:
   Yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan penelitian seperti dokumen Renstra, DPA SKPD, daftar urut kepangkatan, dan hal lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
c. Observasi:
   Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai kondisi kantor dan melakukan wawancara kepada beberapa orang warga mengenai implementasi kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.

Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan Korelasi *Product Moment* dan Analisis Regresi Linier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Deskripsi Variabel Sumber Daya

Tanggapan responden tentang sumber daya adalah 10 orang (43,48%) dengan kategori baik, 12 orang (52,17%) dengan kategori cukup baik, dan 1 orang (4,35%) dengan kategori kurang baik. Selebihnya, tidak terdapat responden yang berada pada kategori sangat baik dan tidak baik. Berdasarkan perhitungan, nilai rata-rata variabel sumber daya diketahui sebesar 46,70. Dari hal tersebut diketahui bahwa sumber daya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dikategorikan cukup baik.

2. Hasil Deskripsi Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Tanggapan responden tentang keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan

dasar adalah 10 orang (43,48%) dengan kategori baik, dan 13 orang (56,52%) dengan kategori cukup baik. **Selebihnya**, tidak terdapat responden yang berada pada kategori sangat baik, kurang baik dan tidak baik. Berdasarkan perhitungan, nilai rata-rata variabel keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar diketahui sebesar 64,10.Dari hal tersebut diketahui bahwa keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar dikategorikan cukup baik.

3. Analisis Korelasi

Berdasarkan analisis korelasi dengan menggunakan korelasi *Product Moment* diketahui bahwa terdapat hubungan antara variabel sumber daya terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan pendidikan dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi sebesar 0,774 yang termasuk pada kategori hubungan yang kuat yakni antara 0,60-0,799.

4. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk menguji pengaruh antara variabel sumber daya terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar digunakan analisis Regresi Linier sederhana, dan didapatkan persamaan regresi linier sederhana, yaitu Y'= 21,526 + 0,911 X. Angka koefisien regresi sebesar 0,911 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan tingkat sumber daya sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan keberhasilan implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar sebesar 0,911 satuan. Sedangkan angka koefisien konstanta sebesar 21,526 menunjukkan bahwa apabila tidak ada sama sekali pengaruh dari variabel sumber daya, maka keberhasilan implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar akan tetap sebesar 21,526 satuan.Oleh karena itu berdasarkan persamaan regresi linier sederhana tersebut, dapat ditarik keputusan bahwa hipotesis diterima, yaitu terdapat pengaruh yang positif antara sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara.

Besarnya pengaruh antara variabel sumber daya dan variabel keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar yaitu sebesar 59,9%, sedangkan 40,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel sumber daya sebagai variabel bebas dikategorikan secara umum cukup baik yaitu sebesar 46,70. Dari tanggapan responden diketahui bahwa sebanyak 12 orang (52,17%) responden menyatakan variabel sumber daya masuk dalam kategori cukup baik.
2. Variabel keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar sebagai variabel bebas dikategorikan secara umum cukup baik yaitu sebesar 64,10. Dari tanggapan responden diketahui bahwa sebanyak 13 orang (56,53%) responden menyatakan variabel keberhasilan standar pelayanan minimum pendidikan dasar dalam kategori cukup baik.
3. Berdasarkan hasil korelasi dan analisis regresi sederhana yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa koefisien dari persamaan regresi adalah positif dan dapat disimpulkan bahwa:
   a. Sumber daya memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 0,774, termasuk dalam hubungan yang kuat.
   b. Besarnya pengaruh antara variabel sumber daya dan variabel keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar yaitu sebesar 59,9%, sedangkan 40,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

2. Saran

Berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian dan simpulan yang ada, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1) Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa sumber daya berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu, peneliti menyarankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada, agar implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dapat berhasil dan dicapai dengan baik.

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang lainnya untuk menambah atau mencari variabel lain yang berpengaruh bagi keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar tersebut agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.

3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kecilnya jumlah responden yang hanya berjumlah 23 orang. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang ada tergolong kecil, sehingga hasil generalisasi belum memadai untuk populasi lebih luas.
2) Responden penelitian yang dalam hal ini pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan Seksi Pendidikan di Kantor Camat seponti yang menangani kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar ini banyak yang tidak berada di tempat. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang sedang melaksanakan kegiatan atau program dinas di luar kantor dan melakukan perjalanan dinas, sehingga menyebabkan pembagian dan pengumpulan angket yang menjadi relatif lama.
3) Kurang terjangkaunya akses antara Dinas Pendidikan dan Kecamatan Seponti, karena jarak antara ibukota kabupaten dan kecamatan Seponti yang tergolong cukup jauh serta akses jalan yang ditempuh masih belum tersedia dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, H. M. Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy*. Surabaya: ITS Press.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Priyatno, Duwi. 2012. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju

Siregar, Syofian. 2010. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.

----------. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

----------. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: Truenorth.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

----------. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses.* Yogyakarta: Media Pressindo.

----------. 2012. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta: CAPS.

SKRIPSI:

Dwinanto, Beni Arya. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Kayong Utara.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Sidabutar, Armitha Octarina. 2014. *Pengaruh Sumber Daya Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Transmigrasi Di Sungai Bulan C Kabupaten Kubu Raya.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.*

Peraturan Bupati No. 60.A tahun 2009 tentang *penyediaan layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Sederajat di Kabupaten Kayong Utara.*

Peraturan Bupati Kayong Utara No. 11 Tahun 2009 tentang *Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.*

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 57 Tahun 2009 tentang *Rincian Tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub. Bagian, dan Kepala Seksi pada Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara.*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: Dody Sukma Arta Permana
NIM / Periode Lulus	: E42011089 / 2015
Fakultas / Jurusan	: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP	: artha.dody@gmail.com / **085245212208**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
- ☑ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
PadaTanggal : 21 Agustus 2015

(Dody Sukma Arta Permana)